

HUBUNGAN ANTARA POLITIK DAN KEBEBASAN MENURUT HANNAH ARENDT

FRANSISKUS DOSE

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, Ledalero, NTT
E-mail: dosefransiskus1980@gmail.com

FIDELIS REGI WATON

Kölner Hochschule für Katholische Theologie, Köln, Germany

Abstract: Employing the qualitative method of literature review of primary and secondary sources, this paper sets out to reconstruct Hannah Arendt's thought on the relation between politics and freedom. Freedom, in Arendt's view, is not an objective nor result of politics, but rather something inherent in it. Action, speaking, and the public sphere are the three aspects and prerequisites for politics to be regarded as harboring freedom. Action and speaking presuppose plurality. Both involve not only one person, but the multitude, that inhabit the world. When many people act and speak, they are always free and inhabit the realm of politics. The public sphere makes it possible for the people to act, speak, and interact in freedom, and thus also to do politics. Arendt endorses the interactions in the Ancient Greek *Agora* as a model of the public sphere. Research on Arendt's thought can significantly contribute to understanding politics. Politics is a never-ending action and speaking; it is a process. It never has an ending as through action, communication, and interaction, people can produce something new. For action, speaking, and interaction to be possible, the public sphere is a necessary condition.

Keywords: Arendt, politics, freedom, plurality, action, speaking, public sphere.

Abstrak: Melalui pendekatan kualitatif, yakni telaah literatur baik primer maupun sekunder, tulisan ini hendak merekonstruksi pemikiran Hannah Arendt tentang hubungan antara politik dan kebebasan. Kebebasan, menurut Hannah Arendt, bukanlah tujuan dan hasil dari politik, melainkan sesuatu yang inheren dalam politik. Tiga aspek

sekaligus kondisi agar politik dapat disebut mengandung kebebasan adalah tindakan, berbicara, dan ruang publik. Tindakan dan berbicara mengandaikan adanya pluralitas. Keduanya melibatkan bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang, yang menempati dunia. Ketika banyak orang bertindak dan berbicara, mereka selalu bebas dan berada dalam konteks politik. Ruang publik memungkinkan manusia untuk bertindak, berbicara, dan berinteraksi dalam kebebasan, dan dengan demikian juga berpolitik. Arendt menjadikan interaksi di *Agora* pada zaman Yunani kuno sebagai model dari ruang publik. Penelitian tentang gagasan Arendt memberikan kontribusi signifikan untuk memahami politik. Politik adalah tindakan dan pembicaraan yang kontinu; ia adalah sebuah proses. Ia tidak pernah mencapai hasil akhir karena melalui tindakan, komunikasi, dan interaksi, manusia memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Untuk bisa bertindak, berbicara, dan berinteraksi, ruang publik adalah sebuah keharusan.

Kata-kata Kunci: Arendt, politik, kebebasan, pluralitas, tindakan, berbicara, ruang publik.

PENDAHULUAN

“Der Sinn von Politik ist Freiheit”¹, makna politik adalah kebebasan. Dengan pernyataan yang tertera dalam karyanya, *Was ist Politik?* (Apa itu Politik), Hannah Arendt (1906-1975) menyuguhkan gagasan esensial dari teori politiknya. Menurut Arendt, kata “makna” dalam kalimat di atas menandakan bahwa kebebasan hanya ditemukan dalam implementasi, yakni dalam tindakan politik itu sendiri, bukan dalam dampak politik.² Kebebasan bukanlah tujuan atau maksud politik, karena tujuan lazimnya dikonotasikan dengan apa yang pada akhirnya hendak dicapai, sedangkan “makna” bercorak intrinsik dalam objek atau tindakan. Atas pendasaran ini, kalimat “makna politik adalah kebebasan” memiliki maksud

1 Hannah Arendt, *Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß*, ed. Ursula Ludz (München: Piper, 2007), 28.

2 Tonio Oeftering, *Das Politische als Kern der politischen Bildung. Hannah Arendts Beitrag zur Didaktik des politischen Unterrichts* (Schwalbach: Wochenschau, 2013), 105.

bahwa kebebasan terkandung dalam politik dan aktivitasnya. Politik dan kebebasan saling mengandaikan.³

Jika politik dan kebebasan saling mengandaikan, apa saja persyaratan yang memungkinkan pengandaian timbal balik kedua aspek ini? Aspek dan kerangka mana yang diperlukan agar kebebasan bisa dialami dalam politik dan urusan yang berkaitan dengannya? Arendt menyebut tiga aspek atau kondisi fundamental yakni “tindakan” (*Handeln*), “berbicara” (*Sprechen*) dan “ruang publik” (*öffentlicher Raum*). Ketiga aspek inilah yang hendak ditonjolkan dalam tulisan ini. Yang dikaji adalah peran tindakan, berbicara dan ruang publik bagi politik dan kebebasan, atau mengapa – hemat Arendt – tindakan, berbicara, dan ruang publik memiliki status fundamental bagi politik dan kebebasan.

Aspek kebaruan yang kami temukan dari pemikiran dan argumen Arendt adalah bahwa kebebasan itu inheren dalam aktivitas politik. Selain itu, konsep ruang publik menurut Arendt bukan saja soal ruangan atau tempat. Yang menentukan untuk sebuah ruang publik adalah aktivitas, interaksi atau tindakan. Sebuah ruang parlemen misalnya baru bisa dikatakan sebagai ruang publik jika ada orang yang berinteraksi di dalamnya. Lebih dari itu, untuk menekankan kebaruan (*novum*) dalam tulisan ini, di antara pemaparan teori Hannah Arendt tentang korelasi antara politik dan kebebasan, kami memberikan komentar yang bersubstansikan kritik, implementasi dan relevansi gagasannya dalam fenomena perpolitikan Indonesia terkini.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sebagai sumber utama, kami menggunakan literatur primer dari Hannah Arendt dalam Bahasa Jerman yang kami terjemahkan sendiri ke dalam Bahasa Indonesia.

Artikel terbaru yang dijadikan sumber sekunder untuk tulisan ini adalah artikel dari Yosef Keladu dengan judul “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘di Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks

3 Arendt, *Was ist Politik?*, 203.

Indonesia” (2023). Keladu menekankan bahwa tindakan dan pembicaraan, yang merupakan inti dari politik Arendt adalah syarat untuk sebuah politik yang bermartabat. Politik yang bermartabat adalah politik yang mengakui pluralitas dan menekankan komunikasi antara warga negara. Yang khas dari artikel tersebut adalah, penulis menunjukkan juga relevansi pemikiran Arendt dalam membaca fenomena-fenomena politis di Indonesia seperti usaha pembungkaman suara-suara kritis lewat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pokok analisis pertama yang dibahas dalam tulisan ini adalah tindakan dan berbicara sebagai *conditio sine qua non* dari politik. Karena tindakan, menurut Arendt, sebagai salah satu aktivitas dasar manusia di samping kerja dan produksi – sebagaimana diulasnya dalam karyanya *Vita Activa* –, maka mulanya kami akan menguraikan secara singkat perbedaan antara ketiga aktivitas dasar ini. Setelah itu kami meneliti pluralitas sebagai syarat dasar tindakan dan berbicara. Karena dalam tindakan dan berbicara terkandung “keajaiban” untuk dapat memulai, maka tindakan dan berbicara menjadi sangat penting untuk politik dan kebebasan.

Yang menjadi pokok analisis bahasan kedua adalah ruang publik dan maknanya bagi politik dan kebebasan. Apa peran yang dimainkan ruang publik bagi politik dan kebebasan? Di sini kami juga berpaling pada filsafat kuno yang sering dirujuk Arendt dalam teori politiknya. Arendt misalnya menjadikan *Agora* sebagai model dari ruang publik, di mana warga polis Atena di Yunani bebas berkumpul, berbicara untuk menentukan nasib polis mereka.

Sebagai penutup kami akan menyajikan kesimpulan, kritik dan apresiasi terhadap pemikiran Hannah Arendt tentang hubungan antara politik, kebebasan dan ruang publik.

KERJA, PRODUKSI DAN TINDAKAN

Dalam karyanya, *Vita Activa*, Arendt memetakan tiga aktivitas dasar manusia: kerja (*Arbeit*), produksi (*Herstellen*) dan tindakan (*Handeln*). Setiap aktivitas dasar sesuai dengan salah satu syarat utama yang diberikan kepada spesies manusia untuk hidup di bumi.⁴

Kerja (*Arbeit*) sesuai dengan proses biologis tubuh manusia, yang dalam pertumbuhannya yang spontan, metabolisme dan pembusukannya, bergantung pada hal-hal alamiah yang dihasilkan dan dipersiapkan oleh kerja, untuk memasoknya sebagai kebutuhan hidup organisme.⁵

Kondisi dasar dari aktivitas kerja adalah kehidupan itu sendiri. Karena proses kehidupan manusia bercorak siklus, maka aktivitas kerja tidak pernah berakhir. Ia hanya akan tuntas dengan kematian. Hasil kerja adalah objek konsumsi dengan jangka pendek.⁶

Produksi (*Herstellen*) mengacu pada dunia benda dan objek buatan yang hingga batas tertentu tidak bergantung pada alam. Manusia bergantung pada benda-benda dimaksud. Insan produksi (*homo faber*) menghasilkan hal-hal tersebut dalam keragaman yang tidak terbatas, yang jumlahnya membentuk dunia, di mana kita hidup. Dibandingkan dengan kerja, proses produksi berakhir, ketika suatu objek telah diselesaikan. Apa yang diproduksi bisa bertahan lebih lama dari masa hidup manusia. Syarat dasar produksi adalah keduniawian, yaitu ketergantungan eksistensi manusia pada benda dan objek.⁷

Aktivitas tindakan (*Handeln*) adalah satu-satunya aktivitas *Vita activa*, yang terjadi secara langsung antarmanusia tanpa mediasi materi, material dan benda. Syarat fundamental tindakan adalah fakta pluralitas; arti-

4 Hannah Arendt, *Vita activa oder vom tätigen Leben*, (München: Piper, 2008), 16.

5 Arendt, *Vita activa*, 16.

6 Dana R. Villa, *Arendt and Heidegger. The Fate of the Political*, (New Jersey: Princeton University Press, 1996), 26.

7 Arendt, *Vita activa*, 16. Bdk. Hannah Arendt, "Arbeit, Herstellen, Handeln", *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 46, no. 6 (1998): 1002, <https://doi.org/10.1524/dzph.1998.46.6.997>.

nya kenyataan, bahwa bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang yang hidup di bumi dan menghuni dunia.⁸ Fakta pluralitas juga berarti bahwa manusia itu berbeda. Tidak ada orang yang sama dengan orang lain, yang pernah hidup, sedang hidup atau akan hidup.⁹

Ketiga aktivitas dasar dan syarat-syaratnya tersebut berada di bawah satu kondisi esensial yang sama, yakni kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas). Sehubungan dengan kematian (mortalitas), kerja menjamin kelangsungan hidup individu dan kontinuitas spesies. Produksi dan apa yang diproduksi bertahan lebih lama dari eksistensi manusia. Produksi independen dari realitas kefanaan manusia.¹⁰ Tindakan, sejauh berguna untuk pembentukan dan pemeliharaan komunitas politik, menciptakan persyaratan untuk kesinambungan antargenerasi, bagi memori dan dengan demikian bagi sejarah.¹¹

Terkait dengan kelahiran (natalitas), ketiga aktivitas manusiawi dimaksud (kerja, produksi dan tindakan) bertugas untuk mempersiapkan masa depan. Ketiganya menjamin bahwa kehidupan dan dunia tetap siap dan mampu menghadapi masuknya pendatang baru yang lahir sebagai orang asing. Akan tetapi, yang lebih erat kaitannya dengan natalitas adalah tindakan, ketimbang kerja dan produksi. Awal baru yang diberikan kepada manusia melalui natalitas, terus berlanjut dan mencapai kepenuhan dalam tindakan. Agar ada inisiatif atau hal yang baru, seseorang harus bertindak. Oleh karena itu, menurut Arendt tindakan adalah aktivitas politik *par excellence* yang secara alami mengandaikan natalitas.¹²

8 Arendt, *Vita activa*, 16. Bdk. Yosef Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia", *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 2 (2023): 240, <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.235-252>.

9 Anna Yeatman, "Individuality and Politics: Thinking with and beyond Hannah Arendt", in *Action and Appearance. Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*, ed. Anna Yeatman, et al. (New York: Continuum, 2011), 76.

10 Arendt, *Vita activa*, 17-18.

11 Michael Janover, "Politics and Worldliness in the Thought of Hannah Arendt," in *Action and Appearance*, ed. Anna Yeatman, et al., 30

12 Arendt, *Vita activa*, 18.

Selanjutnya menurut Arendt, kebebasan melekat dalam tindakan. Atas dasar ini, dibandingkan dengan kerja dan produksi, tindakan merupakan satu-satunya aktivitas yang bermakna signifikan untuk politik. Dalam kerja, insan yang bekerja (*animal laborans*) memanifestasikan diri sebagai “budak kebutuhan” untuk memenuhi hajatnya dan mempertahankan eksistensi ras manusia.¹³ Dalam produksi, manusia yang memproduksi (*homo faber*) tidak bebas, karena ia membuat suatu objek berdasarkan model. Model bukan hanya mendahului produksi, tetapi tidak lenyap setelah objek selesai dibuat. Model tetap ada yang memungkinkan terjadinya produksi objek berikut yang identik. Sebaliknya, tindakan merupakan satu-satunya aktivitas yang bebas dan menempati posisi sentral dalam teori politik Arendt.¹⁴

Ketiga aktivitas manusia yang diutarakan Arendt memperlihatkan secara transparan bahwa teorinya, hemat kami, tidak selaras dengan realitas dewasa ini. Ia melandaskan elaborasinya pada fenomena yang ada dalam paguyuban kota Athena kuno (*polis*). Diferensi dan hirarkisasi yang tegas antara kerja, produksi dan tindakan tampaknya bertentangan dengan kenyataan modern, di mana ketiga aktivitas ini acapkali saling terkait erat.

Yang paling mencolok terbaca yakni apresiasi yang tidak komprehensif bahkan lumayan sempit terhadap kerja. Kerja direduksi sebatas pemenuhan kebutuhan biologis dan tidak bersifat politis. Kerja memiliki makna yang jauh lebih luas dan sangat esensial dalam hidup manusia. Dalam antropologinya, Karl Marx sangat menekankan esensi kerja. Marx berargumentasi bahwa manusia yang secara alamiah produktif, merealisasikan diri dalam kerja dan apa yang diproduksikannya. Manusia memang makhluk sosial, tetapi ia mewujudkan dirinya melalui kerja. Keputusan untuk bekerja adalah suatu keputusan yang sadar dan berangkat dari kehendak bebas. Dengan bekerja manusia bebas dan menyatakan identitas spesiesnya. Dalam artian ini manusia sanggup membedakan

13 Arendt, *Vita activa*, 101-102.

14 Arendt, *Vita activa*, 166-168. Bdk. Janover “Politics and Worldliness,” 28; Villa, *Arendt and Heidegger*, 35.

diri dari hewan. Dalam kapitalisme kodrat manusia ini hilang, karena kerja dilakukannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di luar kerja. Kerja tidak lagi dilihat sebagai perwujudan diri, karena dilakukan secara paksa. Kapitalisme memaksa manusia untuk bekerja dan melihat manusia sebagai komoditas. Dalam bekerja manusia bukan lagi mewujudkan dirinya, tetapi mengalami keterasingan. Dengan demikian, kapitalisme mengikis hakikat spesies manusia.¹⁵

Kontribusi Karl Marx sangat besar bagi reformasi pemahaman tentang kerja. Baginya, manusia pertama-tama bukanlah *animal rationale* (hewan yang berakal budi), melainkan *animal laborans* (hewan yang bekerja). Dalam konteks Marx, kerja mengandung unsur ontologis. Atas dasar konsepsi bernas ini muncullah aneka teori positif tentang kerja dan perjuangan nasib para pekerja. Secara khusus ihwal opsi terhadap kerja muncullah aneka aturan dan serikat yang secara politis melindungi para pekerja dan iklim kerja yang humanis. Konsep Hannah Arendt tentang kerja dan reduksi atasnya wajib direvisi, karena kerja bercorak esensial bagi manusia dan sangat berwarna politis.

PERAN FUNDAMENTAL TINDAKAN, BERBICARA DAN PLURALITAS BAGI KEBEBASAN DAN POLITIK

Kondisi dasar dari tindakan (*Handeln*) dan berbicara (*Sprechen*) sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya adalah pluralitas. Tindakan dan berbicara mengandaikan adanya pluralitas manusia. Inilah yang menjadi kekhasan Arendt dalam berfilsafat, berfilsafat dari sudut pandang pluralitas.¹⁶ Pluralitas menurut Arendt lebih dari sekedar multiplisitas. Pluralitas adalah fenomena khas manusia dan memanifestasikan diri dalam dua cara sebagai kesamaan dan perbedaan.¹⁷ Kesamaan me-

15 Karl Marx, *Grundriss der Kritik der politischen Ökonomie* (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1970), 595-596.

16 Yosef Keladu Koten, "Konsep Hannah Arendt Tentang Politik sebagai Pembicaraan dan Kontribusinya dalam Menyikapi Pluralitas Pandangan", *Jurnal Ledalero* 18, no. 1 (2019): 131, <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v18i1.163.123-148>. Bdk. Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia", 242.

17 Arendt, *Vita activa*, 213.

maksudkan bahwa manusia adalah anggota dari spesies yang sama, sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Manusia memiliki kemampuan untuk berbicara dalam satu bahasa, hidup di satu dunia dan sanggup saling memahami dan mengakui sebagai yang setara.¹⁸ Keanekaragaman mengacu pada keunikan dan perbedaan setiap individu. Lewat tindakan dan berbicara, manusia mengekspresikan keunikannya dan menampilkan dirinya dalam keberadaan.¹⁹

Arendt berasumsi bahwa fakta pluralitas tersebut sangat fundamental bagi politik. Politik berbasis pada realitas pluralitas manusia dan politik berurusan dengan kebersamaan dan koeksistensi manusia yang berbeda. Dengan kata lain, tanpa pluralitas manusia, tidak ada politik. Arendt menaruh titik berat pada aspek komunikasi antarmanusia, di mana mereka bertindak dan berbicara secara bebas.²⁰ Ketika orang-orang bekerja sama dengan orang lain dan bertindak bersama, dalam pandangan Arendt, mereka selalu berada dalam konteks politik. Mereka harus menyepakati tujuan bersama, mengkoordinasikan tindakan mereka, menerima kemungkinan kegagalan niat dan rencana mereka, dan merancang rencana alternatif.²¹

Dengan tesisnya bahwa politik berkaitan erat dengan pluralitas, Arendt hendak menentang tradisi filsafat sejak Aristoteles yang memandang manusia secara alamiah sebagai makhluk politik, *zoon politikon*, seolah-olah ada sesuatu yang politis dalam diri manusia, yang merupakan bagian dari hakikatnya.²² Bertentangan dengan itu Arendt berpendapat: Manusia itu apolitis. Politik terjadi dalam interaksi antarmanusia, sehingga sepenuhnya berada di luar manusia. Dengan demikian Arendt dimaksudkan: Hanya ketika orang-orang menjejaki hubungan satu sama

18 Keladu Kote, "Konsep Hannah Arendt", 131.

19 Arendt, *Vita activa*, 213-214.

20 Arendt, *Was ist Politik?*, 9. Bdk. Oeftering, *Das Politische als Kern der politischen Bildung*, 95.

21 Alexandra Popp, *Hannah Arendt. Eine Denkbiografie* (Stuttgart: Schmetterling, 2015), 48.

22 Oeftering, *Das Politische als Kern der politischen Bildung*, 97.

lain, mereka akan hidup selaras dengan nama mereka sebagai *zoon politikon*, makhluk politik.²³

Pluralitas berhubungan dengan kebebasan. Kebebasan sebagai makna politik, hanya ada dalam wilayah antara politik yang khusus dan politik terjadi di dalam relasi, di mana manusia hidup, bertindak dan berbicara satu sama lain.²⁴ Arendt menegaskan bahwa manusia tidak bisa bebas dalam kesendirian lantaran ia berada sendiri dan tidak bertindak bersama orang lain. Dengan menjauhi orang lain, ia tidak bisa mengalami kebebasan dalam arti politis.²⁵

Dengan menekankan hubungan antara pluralitas dan kebebasan, Arendt hendak mengklarifikasi asumsi yang salah, yakni kesamaan antara kebebasan dan kedaulatan, yang tampak jelas bagi banyak orang. Asumsi ini berakar pada gagasan Stoa, yang menyamakan kedaulatan dengan ketidaktergantungan dan ketidakdaulatan dengan ketergantungan.²⁶ Kedaulatan sebagai ketidaktergantungan, menurut Arendt, tidak bisa diidentifikasi dengan kebebasan. Karena jika kebebasan hanya mungkin terjadi dengan melepaskan kontak dengan orang-orang lain, manusia tidak bisa bebas, karena mereka tidak hidup sendiri. Jika kebebasan dan kedaulatan sungguh-sungguh menyiratkan ketidaktergantungan pada orang lain, keduanya tidak bisa ada dalam interaksi dan koeksistensi manusia.²⁷

Manusia dalam format tunggal tidak bisa dibayangkan. Saat lahir, manusia memasuki dunia, di mana orang lain telah ada. Seluruh keberadaan manusia bergantung pada keberadaan orang lain.²⁸ Tidak ada yang namanya satu orang, namun hanya ada orang-orang. Atas dasar ini, kebebasan dan kedaulatan tidak bisa identik, bahkan tidak bisa berada ber-

23 Arendt, *Was ist Politik?*, 11.

24 Arendt, *Was ist Politik?*, 12.

25 Popp, *Hannah Arendt*, 75.

26 Yeatman, "Individuality and Politics", 76-77.

27 Popp, *Hannah Arendt*, 76.

28 Yeatman, "Individuality and Politics", 70.

dampingan. Arendt menyimpulkan: Jika manusia, baik sebagai individu maupun dalam kelompok yang terorganisasi, ingin berdaulat, mereka harus menghilangkan kebebasan. Akan tetapi, jika mereka ingin bebas, mereka harus meninggalkan kedaulatan.²⁹

Lebih lanjut Arendt berpendapat bahwa melalui tindakan dan berbicara orang-orang secara aktif membedakan diri satu sama lain. Tindakan dan berbicara adalah cara manusia menunjukkan diri.³⁰ Tidak ada tindakan tanpa kata, karena andaikan adanya tindakan tanpa kata, maka hal itu adalah tindakan tanpa pelaku.³¹ Fenomena ini bukanlah cara manusia berkomunikasi. Manusia menampakkan diri berkaitan dengan siapakah dirinya, hanya dalam tindakan dan berbicara. Mereka secara aktif menunjukkan keunikan pribadi mereka, melangkah bersama ke panggung dunia, di mana sebelumnya mereka tidak terlihat.³² Berbicara dan tindakan berkaitan erat, karena mereka memberi jawaban atas pertanyaan “siapakah engkau?” Dalam kata-kata yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan, terungkap siapa diri seseorang.³³

Manusia berkomunikasi lewat tindakan dan ucapan dalam dunia yang sudah ada sebelum ia dilahirkan dan di mana orang lain sudah selalu ada. Berkomunikasi dalam dunia tersebut bagaikan “suatu kelahiran kedua”, karena melaluinya seseorang menjadi realitas duniawi, dan pada gilirannya sebagai penegasan fakta natalitasnya.³⁴

Seperti halnya kelahiran adalah suatu awal, tindakan dan berbicara memungkinkan manusia untuk memulai suatu awal yang baru. Manusia sanggup memulai sesuatu yang baru atas inisiatifnya sendiri. Karena se-

29 Hannah Arendt, *Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken*, ed. Ursula Ludz (München: Piper, 1994), 215.

30 Arendt, *Vita activa*, 214.

31 Arendt, *Vita activa*, 218. Bdk. Serena Parekh, *Hannah Arendt and the HUMAN RIGHTS. A Phenomenology of Human Rights* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2006), 24.

32 Arendt, *Vita activa*, 219.

33 Oeftering, *Das Politische als Kern der politischen Bildung*, 121.

34 Parekh, *Hannah Arendt and the HUMAN RIGHTS*, 25. Bdk. Yeatman, “Individuality and Politics”, 70.

tiap manusia lantaran kelahirannya adalah *initium*, suatu permulaan dan pendatang baru di dunia, manusia sanggup mengambil inisiatif, menjadi pemula dan memulai hal-hal baru. Di sini Arendt mengutip kalimat Agustinus bahwa agar ada permulaan, manusia diciptakan, yang sebelumnya tidak ada seorangpun (*Initium ut esset homo creatus est*).³⁵

Awal yang baru melambangkan dinamisme dan proses. Ia selalu sebagai kemungkinan yang tak terbatas dan memungkinkan manusia untuk melakukan “keajaiban”. Melalui kemampuan untuk bertindak dan berbicara, manusia menarik dirinya dari segala yang dapat diduga dan diperhitungkan sebelumnya. Manusia memiliki potensi untuk selalu menghasilkan kemungkinan dari suatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, memproduksi hal-hal baru yang sebelumnya tidak diharapkan.³⁶

Melalui tindakan dan berbicara yang dilakukan manusia di dunia, terciptalah suatu awal yang baru. Hal ini sungguh suatu keajaiban, karena dengannya muncullah sesuatu yang tak terduga dan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam kemampuan spesifik manusiawi ini, dalam tindakan dan berbicara dan dengan demikian dalam bakat untuk membuat awal yang baru serta secara sadar turut campur tangan dalam keberlangsungan dunia dan proses-proses yang berlaku di dalamnya, terdapat kebebasan yang merupakan makna dari politik.³⁷ Keajaiban kebebasan terletak pada kemampuan untuk memulai, yang pada gilirannya terletak pada fakta bahwa setiap manusia, sejauh ia datang ke dunia melalui kelahiran sebagai awal yang baru bagi dirinya sendiri.³⁸

Oleh karena itu, Arendt melihat adanya kesamaan antara kebebasan dan kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru atau kebebasan terdiri dari apa yang kita sebut spontanitas, yang menurut Kant, berlan-

35 Arendt, *Vita activa*, 215-216. Bdk. Parekh, *Hannah Arendt and the HUMAN RIGHTS*, 33-34.

36 Arendt, *Vita activa*, 216-217.

37 Oeftering, *Das Politische als Kern der politischen Bildung*, 123.

38 Arendt, *Was ist Politik?*, 34.

daskan pada kenyataan bahwa setiap manusia mampu untuk memulai serangkaian hal baru dari dirinya sendiri.³⁹ Bagi Arendt, kebebasan bukanlah kehendak bebas atau kebebasan memilih, tetapi kemungkinan untuk merealisasikan apa yang sebelumnya tidak ada.⁴⁰ Lewat persyaratan natalitas, tindakan dan berbicara, manusia sanggup membuat suatu awal yang baru dan dengan demikian mengalami kebebasan. Pernyataan Agustinus: “agar ada permulaan, manusia diciptakan, yang sebelumnya tak ada seorangpun” harus dipahami sebagai: Karena manusia adalah permulaan, ia dapat memulai sesuatu yang baru, dan dengan demikian ia bebas.⁴¹

Hidup tanpa tindakan dan berbicara, dan dengan demikian juga tanpa kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru dan dengan cara itu mengartikulasikan apa yang baru, bukanlah hidup, melainkan kematian yang berlangsung sepanjang hidup manusia.⁴² Kehidupan seperti itu berarti kehidupan yang bergerak menuju kematian dan menyeret segala sesuatu yang manusiawi ke dalam kehancuran dan kebinasaan.

Tindakan, dengan segala ketidakpastiannya, bagaikan pengingat yang selalu ada, bahwa meskipun manusia harus mati, ia tidak dilahirkan untuk mati, melainkan untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan terciptanya manusia, muncullah prinsip awal ke dunia, yang tentu saja, hanyalah cara lain untuk mengungkapkan bahwa dengan terciptanya manusia, tampaklah prinsip kebebasan di bumi.⁴³

Kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru juga menunjukkan potensi manusia untuk berpikir. Dalam kata-kata Kant, manusia memiliki “kapasitas penilaian” (*eine Urteilkraft*) dan “cara berpikir yang diperluas” (*eine erweiterte Denkungsart*). Kapasitas penilaian tampak dalam kenyataan bahwa orang sanggup mengklarifikasikan fenomena ke dalam

39 Arendt, *Was ist Politik?*, 49.

40 Arendt, *Zwischen Vergangenheit und Zukunft*, 206. Bdk. Keladu, “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia,” 241.

41 Arendt, *Zwischen Vergangenheit und Zukunft*, 220.

42 Arendt, *Vita activa*, 215.

43 Arendt, “Arbeit, Herstellen, Handeln”, 1009.

kategori yang sudah dikenal dan juga bahwa orang dapat membuat kategori yang sama sekali baru.⁴⁴ Cara berpikir yang diperluas menunjukkan pluralitas atau intersubjektivitas kapasitas penilaian dan itulah kemampuan untuk berpikir dari posisi orang lain, jadi mempertimbangkan kemungkinan penilaian lain sebelum membuat penilaian sendiri dan memasukkannya dalam keputusan. Dengan dua kemampuan ini, yang berdasarkan pengalaman Arendt, tidak digunakan selama masa totalitarisme, orang sanggup secara aktif menata politik, terus-menerus mempertanyakan hasil politik dan dengan demikian juga mengalami kebebasan.⁴⁵

Dengan menegaskan esensi politik sebagai tindakan dan berbicara, Arendt hendak menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti debat, diskusi dan partisipasi aktif komunitas politik dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam politik. Politik pada dasarnya adalah tindakan, perdebatan, pembicaraan dan komunikasi yang konstan. Karena itu, yang dibutuhkan adalah mempertahankan pluralitas perspektif, terbuka terhadap cara pandang, ide, dan pendapat dari anggota komunitas politik yang majemuk. Dalam konteks ini, semua anggota komunitas diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam menata komunitas politik serta memiliki potensi untuk menghasilkan sesuatu yang baru.⁴⁶

Jika politik berarti berbicara satu sama lain, maka tidak ada kebenaran mutlak. Pernyataan ini sangat signifikan untuk politik dan kebebasan, karena tak seorangpun yang sanggup secara tuntas memahami dunia dan realitas secara objektif. Ia hanya sanggup memandang dan menilai dunia dan urusan kemanusiaan dari sudut pandangnya sendiri. Jika ia ingin melihat dan mengalami dunia sebagaimana sebenarnya, maka ia hanya dapat melakukannya dengan memahaminya sebagai sesuatu yang umum bagi banyak orang, yang terletak di antara mereka, yang memisahkan dan menghubungkan, yang tampak berbeda bagi setiap orang

44 Popp, *Hannah Arendt*, 116.

45 Steve Buckler, *Hannah Arendt and Political Theory. Challenging the Tradition*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 66-67.

46 Keladu Koten, "Konsep Hannah Arendt", 131-132.

dan karena itu hanya dipahami, sejauh mana banyak orang membicarakannya satu sama lain dan bertukar pendapat dan perspektif mereka satu sama lain. Hanya dalam kebebasan berbicara satu sama lain, muncul dunia sebagai apa yang dibicarakan, yang objektivitasnya terpantau dari semua sisi.

Hemat kami, gagasan Arendt yang menekankan politik sebagai tindakan, pembicaraan antara subjek berdasarkan pada fakta pluralitas, tetap relevan sampai saat ini. Politik tidak lain dari diskursus, perdebatan yang kontinu antarmanusia yang memiliki pluralitas pandangan. Partisipasi rakyat, bukan saja hanya elit politik dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, harus menjadi bagian integral dari politik. Partisipasi ini mengandaikan bahwa negara tersebut adalah negara demokrasi. Arendt, seperti yang dikemukakan oleh Keladu, sesungguhnya

[m]embangun sebuah konsep pemerintahan demokrasi partisipatif deliberatif, di mana politik didasarkan pada deliberasi kolektif tentang semua hal yang mempengaruhi komunitas politik. Konsep pemerintahan demokrasi partisipatif deliberatif mengandaikan bahwa pembuatan keputusan merupakan tugas semua warga negara dan bukannya hanya elite politik".⁴⁷

Jika kita menghubungkan gagasan Arendt ini dengan situasi perpolitikan Indonesia yang nota bene adalah negara demokrasi, maka apa yang diidealkan Arendt masih jauh dari realitas. Pemerintah dan elite politik Indonesia justru sering mengabaikan partisipasi dan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan pembuatan undang-undang. Masyarakat dianggap "apolitis", tidak memiliki pengetahuan tentang persoalan-persoalan publik.⁴⁸ Demonstrasi yang terjadi pada pekan terakhir Agustus 2025 merupakan puncak kekecewaan dan kemarahan rakyat atas kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR yang kontroversial, seperti kenaikan gaji dan tunjangan rumah anggota DPR di tengah situasi ekonomi

47 Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia," 247.

48 Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia," 247.

yang sulit. Protes ini kemudian berujung pada kericuhan, bentrokan dan tindakan anarkis, di mana fasilitas umum dibakar dan rumah beberapa anggota DPR dijarah. Arendt sendiri melihat tindakan-tindakan seperti ini sebagai sebuah pilihan terakhir untuk mengembalikan ketidakhadiran politik pada konsensus awal.⁴⁹ Rakyat tidak boleh hanya diperlakukan sebagai mesin pemasok suara saat pemilihan umum demi legitimasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Fenomena pengasingan rakyat dari proses politik tidak bisa dibenarkan dalam kerangka demokrasi. Modus demokrasi representatif wajib dikawinkan dengan asas deliberatif.

Fakta pluralitas yang dideskripsikan Arendt boleh dilihat sebagai pancaran kenyataan keragaman yang selalu dibanggakan di Indonesia. Keragaman yang sangat kaya ini sayangnya masih dicurigai sebagai rongrongan terhadap kesatuan. Yang selalu diperjuangkan dan diidealkan adalah proyek persatuan dan keharmonisan. Rezim Orde Baru memperkenalkan Pancasila sebagai asas tunggal (UU No. 8 tahun 1985) untuk semua organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Patokan ini dimanfaatkan sebagai instrumen represi terhadap pluralitas pandangan dan haluan politik di luar Pancasila sebagai ideologi nasional. Praksis ini terus dilestarikan dalam praksis politik Indonesia dewasa ini yang selalu menggaungkan konsensus dan tidak memberi ruang yang berarti kepada oposisi. Demokrasi dan politik tanpa oposisi lazimnya sangat rentan terhadap manipulasi. Demonstrasi terakhir di Indonesia yang berujung pada kerusuhan – sebagaimana yang telah dilansir di atas – menjadi konsekuensi dari politik tanpa oposisi. Bukannya kepentingan rakyat yang diperjuangkan melainkan konspirasi kepentingan elit politik yang bersatu. Ketika kanal oposisi dan pluralitas pandangan dan kepentingan dibekukan, rakyat memilih jalannya sendiri untuk melawan dan mengartikulasikan aspirasi.

49 Yeremias Jena, "Pemikiran Hannah Arendt mengenai Kekerasan dalam Kekuasaan," *Diskursus* 10, no. 2 (2011): 185-187, <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/download/190/107/>

URGENSI RUANG PUBLIK BAGI KEBEBASAN DAN POLITIK: AGORA SEBAGAI MODEL

Fakta pluralitas, bahwa hanya ada manusia yang jamak, menuntut manusia untuk bertindak, berbicara dan berkomunikasi satu sama lain. Politik –menurut Arendt – tak lain dari bertindak dan berbicara bersama.⁵⁰ Kenyataan pluralitas juga mengandung pembatasan, karena orang harus selalu mempertimbangkan keputusan-keputusannya dengan orang lain. Di sisi lain, orang mempunyai kemungkinan untuk keluar dari ketergantungan, baik yang alamiah maupun yang telah digariskan secara historis melalui tindakan dan berbicara, dan dengan itu ia juga mampu untuk memulai sesuatu yang baru.⁵¹

Jika politik tidak lain adalah tindakan dan berbicara atas dasar pluralitas, jika makna politik adalah kebebasan, maka politik dan koeksistensi manusia membutuhkan ruang publik,⁵² di mana orang bisa berinteraksi secara bebas. Dengan kata lain, kebebasan menurut Arendt tidak mungkin diperoleh dalam kesendirian dan kesunyian.⁵³ Merujuk pada pengalamannya selama era totalitarisme, Arendt menegaskan bahwa politik dalam arti tindakan dan pembicaraan yang bebas hanya bisa terjadi dalam sebuah ruang publik. Ia memahami kebebasan bukan sebagai sesuatu yang pasif, melainkan lebih sebagai “kebebasan aktif”. Hal ini terwujud bukan dalam penarikan diri, tetapi hanya melalui interaksi dengan orang lain, karena mereka hanya menjadi manusia ketika mereka hidup bersama dengan sesama.⁵⁴

Untuk memahami hubungan erat antara politik, kebebasan dan ruang publik, Arendt membawa kita kembali ke zaman Yunani kuno. Di

50 Villa, *Arendt and Heidegger*, 28-29.

51 Popp, *Hannah Arendt*, 54.

52 Kata “publik” berarti *pertama*, segala yang tampak umum, yang dilihat dan didengar setiap orang, yang memberikan publisitas sebesar-besarnya. Arendt, *Vita activa*, 62. *Kedua*, dunia itu sendiri, sejauh ia sebagai apa yang menjadi milik kita bersama, dan yang dibedakan dari apa yang menjadi milik pribadi, tempat yang kita sebut milik pribadi kita. Arendt, *Vita activa*, 65.

53 Popp, *Hannah Arendt*, 54.

54 Popp, *Hannah Arendt*, 54.

polis, di zaman Yunani kuno, kebebasan adalah ciri khas koeksistensi manusia. Namun hal ini bukan berarti bahwa politik merupakan sarana bagi manusia untuk menjadi bebas. Yang dimaksudkan lebih sebagai kesamaan antara “menjadi bebas” dan “hidup dalam suatu polis” dengan asumsi bahwa manusia harus bebas agar dapat hidup dalam suatu polis. Ia bukanlah budak yang tunduk di bawah paksaan orang lain, juga bukan pekerja yang dipaksa untuk mencari nafkah sehari-hari. Ia harus dibebaskan atau membebaskan diri dari paksaan ini, agar ia boleh mengambil bagian dalam apa yang terjadi secara politik dan publik di polis.⁵⁵

Dalam polis kuno terdapat perbedaan tegas antara ranah privat (ranah rumah tangga, *oikos*) dan ranah publik (ranah politik). Sektor rumah tangga dicirikan oleh keharusan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sana hanya ada upaya untuk menjamin dan melestarikan hidup. Struktur hierarkis berlaku dalam wilayah ini: Bapak atau tuan sebagai kepala rumah tangga, ibu, anak-anak dan budak yang harus taat pada tuannya. Dalam ranah rumah tangga, tak seorangpun yang bebas, tidak juga kepala rumah tangga, apalagi budak. Menurut perspektif Yunani kuno, tuan tidak bebas, karena ia tidak mempunyai pilihan lain selain memberi perintah. Budak harus menaati tuannya. Akan tetapi mereka dibedakan satu sama lain dalam tingkat ketergantungan pada keharusan hidup. Keharusan hidup seorang budak tentu saja lebih berat, karena ia bukan hanya mengurus hidupnya sendiri, tetapi juga hidup tuan rumah.⁵⁶

Berbeda dengan ranah rumah tangga, ranah polis adalah ruang publik, ruang politik dan ruang kebebasan, dengan catatan bahwa kedua area tersebut saling berhubungan. Hubungan ini hanya mungkin, jika pengendalian keharusan untuk hidup dalam wilayah rumah tangga menyediakan kondisi bagi kebebasan dalam polis.⁵⁷

Tuan rumah pada zaman Yunani kuno melalui kekuasaan absolutnya, berkuasa untuk memaksa budaknya membereskan segala urusan

55 Arendt, *Was ist Politik?* 38.

56 Arendt, *Vita activa*, 42. Bdk. Villa, *Arendt and Heidegger*, 18-20.

57 Arendt, *Vita activa*, 40-41.

hidup sehari-hari baginya. Dengan rumusan lain, kerja paksa membebaskan tuan rumah dari pekerjaan dan membebaskannya untuk kebebasan di polis. Menurut Arendt, tujuan pembebasan ini bukanlah kebebasan itu sendiri, yang menjadi ciri khas makna politik, tetapi pembebasan pra-politik untuk kebebasan dalam polis. Makna politik di sini, tetapi bukanlah tujuannya, adalah bahwa orang-orang berinteraksi satu sama lain dalam kebebasan, tanpa kekerasan, paksaan dan dominasi, setara dengan setara, yang mengatur semua hal melalui diskusi dan persuasi bersama.⁵⁸

Dengan kesetaraan, Arendt memaksudkan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas aktivitas politik dan di polis. Aktivitas ini adalah aktivitas berbicara satu sama lain.⁵⁹

Dengan mengambil contoh tuan rumah, Arendt menunjukkan bahwa diperlukan kebajikan khusus untuk memasuki polis, dan dengan demikian juga memasuki politik dan kebebasan. Kebajikan ini dinamakannya sebagai keberanian. Tuan rumah bisa mengalami kebebasan dalam kesetaraan, bukan hanya karena ia tidak memerintah, tetapi juga karena ia berani meninggalkan ranah privat (rumah tangga) dan zona kepastian. Jadi yang bebas hanyalah dia yang siap mempertaruhkan hidup, dan jiwa yang tidak bebas dan bersifat budak dimiliki oleh dia yang bergantung pada cinta yang besar terhadap hidup. Siapa yang memiliki keberanian untuk bergerak dari ranah privat ke ranah publik, akan diganjar dengan kebebasan dalam arti politis.⁶⁰

Kebebasan sungguh memerlukan ruang publik, di mana kebebasan dapat terjadi dan dilaksanakan. Ruang publik ini menjadi politis dan karenanya sebagai tempat kebebasan, ketika ia dijamin di suatu kota, yaitu terikat pada suatu tempat konkret yang dapat bertahan baik dari tindakan-tindakan yang luar biasa maupun nama-nama pelaku yang berkesan seperti di *Agora* (pasar Atena). Di sana, warga polis atau orang-orang

58 Arendt, *Was ist Politik?*, 39.

59 Arendt, *Was ist Politik?*, 40.

60 Arendt, *Was ist Politik?*, 44.

yang bebas dan setara dapat bertemu kapan saja untuk menentukan nasib polis mereka.⁶¹

Tanpa adanya ranah publik yang dijamin secara politis, kebebasan tidak memiliki tempat di dunia ini untuk bisa terwujud. Meskipun kebebasan selalu dan dalam kondisi apapun bisa ada sebagai kerinduan dalam hati manusia, namun tanpa ruang publik kebebasan tidak bisa dibuktikan kepada dunia. Dalam artian sebagai realitas yang dapat dibuktikan, terdapat keselarasan antara ruang publik dan kebebasan, keduanya saling terkait bagaikan dua sisi dari hal yang sama.⁶²

Lebih lanjut Arendt menegaskan bahwa politik dan kebebasan bukan saja memerlukan satu ruang, tetapi juga waktu untuk terjadi. *Agora* hanya berfungsi sebagai tempat politik selama masa tukar pendapat, diskusi dan berbicara. Jika tidak, *Agora* hanyalah tempat, di mana orang-orang bertemu dan mengadakan pasar mingguan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan politik terlalu rapuh untuk berdiri sendiri dalam konteks apapun. Kebebasan politik membutuhkan momen-momen yang didefinisikan dan dibatasi dengan jelas, di mana orang-orang bertemu dan berdebat satu sama lain dalam kesetaraan.⁶³

Agora yang digunakan Arendt sebagai model ruang publik memang memiliki sisi negatif jika dipandang dengan kaca mata kontemporer. Inilah kritik yang bisa kita tujukan kepada Arendt. *Agora* merupakan tempat yang “eksklusif”, karena hanya para pria dewasa yang bebas yang boleh berkumpul di sana. Perempuan, anak-anak dan orang-orang asing tidak mendapat hak atau kesempatan untuk berkumpul di sana dan menyatakan pendapat mereka.⁶⁴ Artinya, hanya sebagian orang Atena saja yang boleh menikmati kebebasan dan ruang publik. Meskipun demikian yang hendak ditekankan Arendt adalah urgensi dari sebuah ruang publik bagi politik dan kebebasan; ruang atau tempat, di mana orang berbicara, ber-

61 Arendt, *Was ist Politik?*, 45-46. Bdk. Popp, *Hannah Arendt*, 57.

62 Arendt, *Zwischen Vergangenheit und Zukunft*, 201-202.

63 Popp, *Hannah Arendt*, 69.

64 Christian Meier, *Die Entstehung des Politischen bei den Griechen*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980), 41.

debat dan berdiskusi; ruang atau tempat, di mana orang bisa menyatakan pendapatnya, mengartikulasikan ide-ide atau argumen-argumen secara baik dan bersama-sama bersedia untuk dikritik oleh yang lain.⁶⁵

Ketersediaan ruang publik tetap menjadi karakteristik utama pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia, kebebasan politik di ruang publik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 28 UUD 1945. Setiap warga negara bebas untuk mengungkapkan pendapat dengan lisan dan tulisan dalam ruang politik selama tidak bertentangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945 serta tujuan Negara Republik Indonesia.

Berhubungan dengan implementasi kebebasan berpendapat di ruang publik, hemat kami ada *dua sisi* yang bisa kita jumpai di tanah air. Di *satu sisi*, ruang publik dijamin dan digunakan baik oleh elit-elit politik maupun oleh rakyat. Ruang publik digunakan oleh elit-elit politik seperti di saat-saat menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif untuk berdebat, membahas persoalan-persoalan mendasar, menukar gagasan dan memaparkan program.⁶⁶ Ruang publik digunakan oleh rakyat lewat berbagai perdebatan, protes, aksi massa dan demonstrasi, seperti perdebatan tentang perubahan iklim, demonstrasi melawan UU TNI yang baru, aksi damai melawan proyek geothermal di Flores, protes massa karena ketidakpuasan dengan kinerja kerja dan kebijakan anggota legislatif. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik dan kebebasan, karena di sana berkumpul orang-orang yang ingin menata hidup bersama, mencari solusi atas persoalan-persoalan bersama demi *bonum commune*.

Di *sisi lain* muncul fenomena, di mana ruang publik dimanipulasi atau dibatasi. Lewat UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersirat upaya untuk membungkam suara-suara kritis dan membatasi kebebasan berekspresi. Kritik terhadap seseorang

65 Keladu Koten, "Konsep Hannah Arendt", 134.

66 Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia", 250.

kerap dituduh sebagai pencemaran nama baik.⁶⁷ Intimidasi diterapkan untuk media dan figur yang bersuara kritis. Jurnalis TEMPO seperti Francisca Christy Rosana diteror lewat pengiriman kepala babi pada tanggal 19 Maret 2025. Iklim kelabu dan arus kemerosotan tengah melanda kebebasan pers di Indonesia.⁶⁸

KESIMPULAN

Setelah memaparkan fundasi teoretis gagasan politik Arendt, kini kami ingin merangkum gagasan dan tesisnya yang signifikan untuk politik dan kebebasan. Di sini tercakup juga kritik dan apresiasi terhadap pemikiran politiknya.

Pertama, *Agora* yang digunakan Arendt sebagai model ruang publik bisa melahirkan kontroversi dari persepsi kontemporer, karena *Agora* bukanlah ruang publik yang inklusif, melainkan hanyalah ruang politik dan kebebasan bagi kaum pria. Kaum wanita tidak mendapat tempat di *Agora* dan dengan demikian dikucilkan dari politik.

Arendt juga memiliki pemahaman yang sempit tentang kerja. Menurutinya, kerja tidak bersifat politis dan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis. Konsep ini, hemat kami, harus direvisi karena kerja sangat bercorak politis.

Kedua, landasan politik adalah tindakan (*Handeln*), berbicara (*Sp-rechen*) dan fakta pluralitas. Politik dipahami Arendt sebagai ranah antara antarmanusia, sebagai tindakan dan berbicara bersama secara langsung. Hanya ketika manusia menjalin hubungan satu sama lain, barulah manusia hidup sesuai dengan namanya *zoon politikon*, makhluk politik. Singkat kata, esensi politik adalah tindakan bersama, berbicara bersama berkat pluralitas. Kenyataan pluralitas juga memungkinkan kebebasan.

67 Keladu, "Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia", 249.

68 Kate Lamb, "A pig's head and decapitated rats: a new era of intimidation dawns for journalists in Indonesia," *The Guardian* 28 March 2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/28/intimidation-journalists-indonesia-pig-heads-rats>.

Manusia hanya bisa bebas (bukan dalam artian mandiri atau berdaulat), jika ia bertindak dan berbicara dengan orang lain.

Ketiga, lewat tindakan dan berbicara, manusia sanggup memulai sesuatu yang baru dan melakukan “keajaiban”. Kemampuan untuk memulai, yang melekat dalam kebebasan, sangat diperlukan bagi politik. Politik itu bukanlah sebuah keadaan aktual. Politik selalu “menjadi”, suatu proses. Dalam arti proses, politik tidak mencapai hasil akhir. Apa yang telah diputuskan harus selalu dipertimbangkan kembali dan dipertanyakan melalui diskusi dan perdebatan. Dengan demikian bisa terjadi sesuatu yang baru, apa yang sebelumnya dianggap mustahil.

Keempat, politik dan kebebasan membutuhkan suatu ruang publik (*öffentlicher Raum*). Arendt mendasarkan tesisnya, di *satu sisi*, pada pengalaman di Yunani kuno, pada pertemuan di *Agora*, meskipun *Agora* dari perspektif sekarang merupakan tempat yang hanya memberikan hak berbicara dan berkumpul kepada pria dewasa yang bebas. Yang dimaksudkan dengan ruang publik bukan hanya sebuah tempat atau ruangan, melainkan juga interaksi. Bagi Arendt, sebuah ruangan, tempat tanpa interaksi antarmanusia belum bisa disebut sebagai sebuah ruang publik.

Di *sisi lain*, Arendt melandaskan tesisnya tentang urgensi dari ruang publik pada pengalamannya di bawah totalitarianisme, di mana ruang publik dihapuskan. Bagi Arendt, kebebasan dan ruang publik berkaitan erat. Siapa yang membatasi ruang publik, ia bukan hanya mendepak kebebasan ke ranah privat, melainkan juga mempertanyakan eksistensinya. Siapa yang membatasi kebebasan, ia juga mempertanyakan eksistensi ruang publik. Bagi Arendt, kebebasan adalah “aset publik”, yang penggunaannya tidak bermakna dalam kehidupan privat. Arendt memahami kebebasan tidak hanya sebagai kebebasan untuk memilih, tetapi juga kebebasan aktif melalui tindakan dan berbicara.

Penghapusan ruang publik sebagai ruang politik merupakan ancaman terhadap kebebasan. Arendt sangat gigih untuk memperjuangkan eksistensi dan kontinuitas ruang publik dan kebebasan. Berulang kali ia

menekankan bahwa “*der Sinn von Politik ist Freiheit*” (Makna politik adalah kebebasan).

DAFTAR RUJUKAN

- Arendt, Hannah. *Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken 1*, edited by Ursula Ludz. München: Piper, 1994.
- _____. “Arbeit, Herstellen, Handeln.” *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 46, no. 6 (1998): 997-1009. <https://doi.org/10.1524/dzph.1998.46.6.997>.
- _____. *Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß*, edited by Ursula Ludz. München: Piper, 2007.
- _____. *Vita activa oder Vom tätigen Leben*. München: Piper, 2008.
- Buckler, Steve. *Hannah Arendt and Political Theory. Challenging the Tradition*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Janover, Michael. “Politics and Worldliness in the Thought of Hannah Arendt.” In *Action and Appearance. Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*, edited by Anna Yeatman, Phillip Hansen, Magdalena Zolkos and Charles Barbour, 25-38. New York: Continuum, 2011.
- Jena, Yermias. “Pemikiran Hannah Arendt mengenai Kekerasan dalam Kekuasaan,” *Diskursus* 10, no. 2 (2011): 166-190. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/download/190/107/>
- Keladu, Yosef. “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia,” *Politica: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 2 (2023): 235-252. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.235-252>.
- Keladu Koten, Yosef. „Konsep Hannah Arendt Tentang Politik sebagai Pembicaraan dan Kontribusinya dalam Menyikapi Pluralitas Pandangan.” *Jurnal Ledalero* 18, no. 1 (2019): 123-147. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v18i1.163.123-148>.
- Marx, Karl. *Grundriss der Kritik der politischen Ökonomie*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1970.
- Meier, Christian. *Die Entstehung des Politischen bei den Griechen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.
- Oeftering, Tonio. *Das Politische als Kern der politischen Bildung. Hannah Arendts Beitrag zur Didaktik des politischen Unterrichts*. Schwalbach: Wochenschau, 2013.

- Parekh, Serena. *Hannah Arendt and the HUMAN RIGHTS. A Phenomenology of Human Rights*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2006.
- Popp, Alexandra. *Hannah Arendt. Eine Denkbiografie*. Stuttgart: Schmetterling, 2015.
- Villa, Dana R. *Arendt and Heidegger. The Fate of the Political*. New Jersey: Princeton University Press, 1996.
- Yeatman, Anna. "Individuality and Politics: Thinking with and beyond Hannah Arendt." In *Action and Appearance. Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*, edited by Anna Yeatman, et al., 69-86. New York: Continuum, 2011.